

RINGKASAN

Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan bagian dari sistem dan prosedur pengeluaran kas, Surat Perintah Membayar (SPM) dapat diterbitkan jika pengeluaran yang diminta tidak melebihi anggaran yang tersedia dan didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangan. Tujuan Laporan Kerja Praktek ini yaitu untuk mengetahui bagaimanakah sistem dan prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM -UP) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Bandar Lampung. Kementerian pekerjaan umum merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi perumusan kebijakan teknis operasional pembangunan dan pengelolaan umum, sehingga dalam mengelola keuangan daerah harus memiliki sistem dan prosedur yang memadai sebagai salah satu sarana dan prasarana dalam pengarsipan dokumen yang lebih baik. Metode penelitian dalam menyusun laporan tugas akhir ini yaitu pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh prosedur penerbitan Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP) pada Kementerian Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung penerapannya belum sesuai dengan karakteristik pedoman pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun.